

**POLA PEMBINAAN KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH DI
KABUPATEN SIAK (STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR
14 TAHUN 2016 DI KECAMATAN SIAK)**

Oleh : Aprilia Ningsih

Aprilianingsi63@gmail.com

Pembimbing : Hasim As'ari

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Family life is the core of the community development process so that every family is expected to build the household into a family which acquired the peace of life full of love and affection as the main purpose of marriage. Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) from the Ministry of Religions RI which is then applied by the Government of Siak Regency through Kampung Binaan Keluarga Sakinah. Siak subdistrict is one of the place of performance the activities of the contruction of small-scale family Hometown Sakinah. The method of this research is use qualitative method with approach case studies. The concept of the theory is theory of Implementation Success by Grindle (Agustino:2016) i.e. the Content Of Policy: interest that affect the type of benefits, the degree of change is to be achieved, the layout of the retrieval the decision, implementing programs, and resources used. Content Of Policy: power interest and strategy, characteristics of the institution and the ruling regime, and compliance and responsiveness of the executor. Data collection done with interview, observation, and documentation. Based on the result of the analysis, conclusion is the implementation of such activities can improve practice and knowledge as well as the religion that quantitative show that public has been able and execute well and true worship. But there are still many problem in terms of implementation in causing this activity has not been running optimally, moreover on the indicator by Grindle.

Keywords : Policy, Implementation, Built Village of Sakinah Family

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Siak merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dimekarkan pada tahun 1999. Dalam sektor pemerintahan Kabupaten Siak terbagi menjadi 14 daerah pemerintahan kecamatan. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut: Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera. Untuk mencapai visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Siak membuat beberapa program dan kegiatan, yang salah satu diantaranya adalah Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS), yang bertujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang agamis dan kesejahteraan ekonomi keluarga di Kabupaten Siak.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Dengan terbitnya keputusan menteri tersebut maka Pemerintahan Kabupaten Siak sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terpanggil untuk melaksanakan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah tersebut. Seperti yang disampaikan sebelumnya, ikut sertanya Pemerintahan Kabupaten Siak dengan diadakannya kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) dari Keputusan Menteri Agama RI tersebut maka

dikeluarkanlah Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petujuk Teknis Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten. Maka dari kebijakan tersebut lahirlah kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah.

Proses KBKS merupakan gagasan besar dan mulia dalam membentuk Keluarga Sakinah melalui Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah telah dimulai dari tahun 2012. Pada tahun 2012 tersebut sudah dimulai namun masih dalam tahap percobaan, pada tahap percobaan ini kampung yang ditunjuk yaitu Kampung Rawang Air Putih. Masa percobaan ini dimulai pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Adapun tujuan umum dilaksanakannya kegiatan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ini adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia. Sasaran gerakan keluarga sakinah adalah seluruh keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berada pada suatu kampung.

Setelah melewati masa percobaan selama dua tahun yang dilaksanakan di Kampung Rawang Air Putih, maka pada tahun 2015-2018 jumlah kampung yang mengikuti Kegiatan KBKS ini ditingkatkan menjadi empat belas kampung. Setiap kampung yang ditunjuk tersebut harus mewakili setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Untuk pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Siak sudah menyiapkan dana sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap kampung yang mengikuti Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah. Dana yang telah

dipersiapkan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Siak. Dana ini dipersiapkan untuk memaksimalkan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS).

Berdasarkan survey yang dilakukan selama tiga bulan di Kabupaten Siak dihasilkan bahwa pengajian di Kabupaten Siak masih 0% (nol persen), maka dari fenomena inilah yang menyebabkan Kementerian Agama Kabupaten Siak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak membuat suatu kegiatan yang dinamakan Kampung Binaan Keluarga Sakinah.

Ada beberapa fenomena yang tidak sesuai harapan sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini antara lain:

1. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) masih belum berjalan secara merata atau menyeluruh.
2. Segi pendanaan Pemerintahan Kabupaten Siak hanya mendanai kampung pelaksana Program KBKS selama setahun dan penyaluran dana masih tidak lancar
3. Tujuan Program KBKS yaitu peningkatan kualitas pengalaman agama dan kesejahteraan ekonomi keluarga tetapi hanya terfokus pada kegiatan pendalaman agama.
4. Kurangnya inovasi kegiatan dalam pola pembinaan kelompok pengajian

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak)?
2. Mengapa Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak) belum atau sudah berjalan secara optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak).
2. Untuk mengetahui penyebab Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak) masih belum atau sudah berjalan secara optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.
2. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat

menjadi acuan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat, daerah untuk mengambil kebijakan dalam Implementasi sebuah kegiatan. Terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Implementasi Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah ini agar menjadi contoh bagi daerah lainnya.

2. KONSEP TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) sering kali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Menurut (Nugroho, 2017) kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis maupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategis, maka didalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat didalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi maka kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga bersifat negatif, didalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.

Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda, namun kebijakan merupakan definisi yang menekankan tidak hanya pada yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Charles O. Jones dalam (Tahir, 2015) menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen: *Goal*

atau tujuan yang diinginkan, *Plans* atau proposal yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan. *Programs* yaitu upaya-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan, *Decisions* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program, *Efec*, yaitu akibat-akibat dari program (baik sengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Menurut (Winarno, 2016) menyatakan bahwa sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini rinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori ini antara lain sebagai berikut: Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), Keputusan kebijakan (*policy decisions*), Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), Dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*).

Berdasarkan pengertian dari kebijakan publik tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Implementasi dipandang dalam. Menurut (Nugroho, 2016) mengemukakan bahwa implementasi adalah tahap di mana kebijakan dilaksanakan melalui organisasi yang ada atau yang akan dibuat. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cara (1)

menyiapkan organisasi pelaksana; (2) menyiapkan manusia pelaksana; (3) menyiapkan prosedur pelaksanaan kebijakan (*governance, modality*).

Kemudian menurut **Mazmanian** dan **Sebastier** dalam (**Wahab, 2014**) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Implementasi intinya kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok. (**Purwanto & Sulistyastuti, 2015**)

Untuk melihat keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik Menurut **Grindle** dalam (**Agustino, 2016: 143-145**) maka ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*:

1. *Content of policy* menurut Grindle adalah
 - a. *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
 - b. *Type of benefit* (Tipe manfaat)
 - c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
 - d. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)

- e. *Program Implementor* (pelaksana program)
2. *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) *Context of Policy* menurut Grindle adalah:
 - a. *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
 - b. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
 - c. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Kemudian untuk mengoptimalkan penelitian ini, peneliti menggunakan strategi penelitian *case study* (studi kasus). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan: (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, (2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informen, (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siak Kabupaten Siak yang mana Kampung Suak Lanjut, Kampung Rawang Air Putih, dan Kampung Langkai ini menjadi salah satu dari pelaksana Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS). Peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah atau yang disingkat KBKS hanya dilaksanakan di Kabupaten Siak. Kecamatan Siak peneliti

pilih karena merupakan Kecamatan yang berada di ibu kota Kabupaten Siak yang memiliki banyak akses dan merupakan kecamatan yang menjadi percobaan sehingga membuat peneliti tertarik untuk melihat seberapa jauh keberhasilan kegiatan KBKS ini di kecamatan tersebut. Ada beberapa instansi terkait sebagai lokasi penelitian peneliti yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kampung Kabupaten Siak dan Kementrian Agama Kabupaten Siak, Kantor Kecamatan Siak, Kantor Desa/Kampung Suak Lanjut, Kantor Desa/Kampung Rawang Air Putih, Kantor Desa/Kampung Langkai

3.2 Informan Penelitian

Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai pelaksanaan kebijakan kota layak anak.

Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

- a. Bupati Siak
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak
- c. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Siak
- d. Kasubit Partisipasi Swadaya Masyarakat Kampung Kabupaten Siak
- e. Camat Kecamatan Siak
- f. Pengulu Kampung Suak Lanjut
- g. Penghulu Kampung Rawang Air Putih
- h. Penghulu Kampung Langkai
- i. Masyarakat Kampung Suak Lanjut, Kampung Rawang Air Putih, dan Kampung Langkai

3.3 Jenis Data

- a. Data Primer
Data yang diperoleh secara

langsung dari wawancara dengan informan-informan mengenai Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak. Data yang diperoleh langsung dari informan antara lain meliputi:

1. Hasil wawancara dengan pihak terkait dengan Bupati Siak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Siak, Kasubit Partisipasi Swadaya Masyarakat Kampung Kabupaten Siak, Camat Kecamatan Siak, Pengulu Kampung Suak Lanjut, Penghulu Kampung Rawang Air Putih, Penghulu Kampung Langkai, Masyarakat Kampung Suak Lanjut, Kampung Rawang Air Putih, dan Kampung Langkai
2. Observasi yang dilakukan peneliti melihat, mencatat ditempat-tempat dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kota layak anak.
 - a. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu terdiri:
 1. Indikator keberhasilan Kampung Binaan Keluarga Sakinah
 2. Pedoman gerakan keluarga sakinah
 3. Berita dari media elektronik mengenai kampung binaan keluarga sakinah
 4. Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Tekanis Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak
 5. Profil Kabupaten Siak
 6. Profil Kecamatan Siak
 7. Profil Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sak

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Observasi (Pengamatan)

Data observasi ini didapat dengan melakukan observasi langsung ke lokasi yang berkaitan dengan pola pembinaan kampung binaan keluarga sakinah, tentang apa saja yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Siak untuk kegiatan kampung binaan keluarga sakinah ini terutama di Kecamatan Siak. Observasi peneliti dilakukan dimulai pada bulan Desember 2018 sampai bulan Maret 2019

b. Wawancara

wawancara dapat dikatakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian terutama dalam kegiatan kampung binaan keluarga sakinah ini. Informan yang peneliti wawancara mulai dari pelaksana tingkat kabupaten

sampai dengan pelaksana tingkat kampung. Peneliti melakukan wawancara pada saat pra riset dan riset yang dilakukan mulai pada bulan Mei 2018 hingga bulan Maret 2019.

c. Dokumentasi

Hal ini berkaitan dengan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah yang mana berguna untuk mencari data sekunder untuk data primer. Dokumentasi yakni teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Adapaun untuk dokumentasi peneliti sajikan pada lampiran dan peneliti dapat pada saat penelitian ini berlangsung.

3.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

Pertama, Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk dianalisis, dengan cara memilah, men-scening hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai dilakukan.

Kedua, Tahap selanjutnya, peneliti membaca keseluruhan data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang Implementasi Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Siak

Kabupaten Sian (Studi pada Pola Pembinaan Kelompok Pengajian) dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan penelitian, bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari kedalaman, penuturan informasi tersebut.

Ketiga, Setelah itu, peneliti lakukan dengan meng-coding data. Yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Data tulisan tersebut berupa Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak.

Keempat, Tahap selanjutnya, peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan yaitu teori Implementasi Kebijakan untuk dijadikan suatu rangkaian cerita dalam narasi atau laporan kualitatif.

Kelima, Tahap terakhir peneliti memaknai data, dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari setiap informan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak)

4.1.1 Isi Kebijakan (Content of Policy)

4.1.1.1 Proses

Proses KBKS merupakan

gagasan besar dan mulia dalam membentuk Keluarga Sakinah melalui Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah telah dimulai dari tahun 2012. Terdapat mekanisme kerja dalam Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah ini. *Pertama*, menentukan potensi wilayah kerjanya maksudnya adalah kampung yang hendak dipilih mayoritas harus beragama islam, perangkat kampungnya harus memiliki koitmen yang tinggi dalam pengembangan keagamaan, kemudia masyarakat mampu berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan KBKS baik dibidang pembangunan keagamaan maupun dibidang peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, dan harus memiliki sarana ibadah yang memadai. *Kedua*, menentukan dan membuat kelompok binaan yang berdasarkan data aksudnya adalah data yang diberikan harus lengkap dan menjadi dasar untuk melaksanakan Kegiatan KBKS kepada kampung yang telah ditunjuk. *Ketiga*, membuat program dan perencanaan bimbingan/pembinaan. *Keempat*, setelah semua terpenuhi maka dimulailah melaksanakan semua pola kegiatan yang telah ditetapkan tersebut. *Kelima*, pihak Kelompok Kerja Kabupaten melakukan evaluasi dan monitoring.

4.1.1.2 Tujuan

Tujuan umum dilaksanakannya kegiatan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah ini adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.

Sedangkan tujuan khusus Kegiatan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan, mengamalkan, dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
2. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi mesjid, koperasi majelis taklim, dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta mobilisasi potensi zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana keagamaan lainnya.
3. Menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan sosial.
4. Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah.
5. Membina remaja usia nikah agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran, dan tindak kriminal lainnya.
6. Membina pangan halal bagi masyarakat, industri dan importer pangan agar masyarakat muslim terhindar dari mengkonsumsi barang haram baik dari segi cara memperoleh bahan baku, cara mengolah, cara distribusi, dan cara

penyajian.

7. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat, dan lingkungan melalui pendekatan agama dan gerakan jumat bersih.
8. Meningkatkan upaya penanggulangan inveksi menular seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.
9. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi dan seimbang.

Banyak tujuan yang ada tetapi dari yang peneliti temukan Kegiatan Kampung Binaan Sakinah di Kabupaten Siak ini masih berfokus kepada tujuan agama saja kegiatannya pun masih tidak merata. Padahal banyak tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu dari segi tujuan kegiatan bisa dikatakan belum terlaksana karena hanya fokus pada tujuan peningkatan kualitas pengalaman agama.

4.1.1.3 Pelaksana

Pelaksana program harus adanya sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia sendiri adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia dalam KBKS kalau dilihat dari segi tingkat pendidikan masih ada yang rendah yaitu tamatan SMA (sekolah menengah atas). Kalau dilihat dari tingkat pendidikannya tersebut maka sumber daya manusia yang tersedia masih kurang baik karena peran ustadz pembina itu adalah

sebagai implementor sehingga yang disampaikan nanti kepada kelompok sasaran pun sesuai. Selain itu kedudukan masing-masing implementor dari tingkat yang paling tinggi sampai pada tingkat yang paling rendah terdapat dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak.

4.1.1.4 Manfaat

Ada beberapa tipe manfaat yang didapatkan dari kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah ini yaitu memakmurkan masjid maksudnya adalah setelah kegiatan ini ada Jemaah masjid menjadi bertambah, dengan adanya dana yang dikeluarkan maka fasilitas masjid menjadi lebih baik, buta aksara al-quran menjadi berkurang, meningkatnya pengajian majelis taklim, berkurangnya tingkat perceraian, dan meningkatnya jumlah tahfiz di Kabupaten Siak.

4.1.1.5 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai akan terwujud apabila tahapan-tahapan dalam KBKS dapat terpenuhi secara kseseluruhan yang bisa dilihat dari indikator keberhasilan yang telah dibuat. Untuk mencapai tahapan-tahapan tersebut maka diperlukan pelaksanaan yang maksimal terlebih lagi Implementasi. Adapun tahapan-tahapan yang harus dipenuhi agar tercapainya target yang diinginkan adalah Tahap Rintisan, Tahap Pembinaan, Tahap Pemantapan, Dan Tahap Pengembangan. Yang menjadi masalah untuk mencapai target yang diinginkan adalah pada tahap pengembangan karena Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah ini

harus dilaksanakan berkelanjutan bukan hanya secara bergilir saja supaya tercapainya target utama Pemerintahan Kabupaten Siak yaitu menjadi Kabupaten Sakinah.

4.1.1.6 Sosialisasi

Sosialisasi dalam Kampung Binaan Keluarga Sakinah belum memenuhi target karena belum mewujudkan terpenuhinya sinergis pemahaman tentang pelaksanaan KBKS bagi seluruh komponen/ stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini didukung oleh peserta yang datang tidak sesuai ketentuan dan materi yang diberikan pun tidak sesuai ketentuan. Alasan tersebut peneliti perkuat karena sosialisasi hanya dilakukan satu kali saja ditingkat kabupaten sedangkan sosialisasi ditingkat kampung tidak ada dilaksanakan oleh pihak kampung padahal yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah masyarakat atau keluarga. Kurangnya sosialisasi ini bisa disebabkan oleh lemahnya pengetahuan instansi pemerintahan kampung mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk menyampaikan atau mensosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat.

4.1.1.7 Training Of Trainer (TOT)

Pelaksanaan TOT yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Siak dengan dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sarasanya belum tepat karena berdasarkan observasi yang peneliti lakukan peserta yang datang saat TOT tersebut adalah pihak kecamatan dan Perangkat Kampung sehingga tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Padahal yang harus hadir

tersebut adalah ustadz-ustadz pembimbing dan takmir mesjid yang nantinya akan terjun langsung untuk membina masyarakat dalam kegiatan KBKS ini. Materi TOT yang disampaikan pada saat dilapangan materi yang diberikan oleh narasumber belum sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat selain itu target dari TOT ini belum tercapai yaitu belum terwujudnya Ustadz pembimbing/ Takmir Mesjid yang berkualitas dan memiliki komitmen, tanggung jawab serta etos kerja yang baik dalam rangka melaksanakan program-program KBKS. Berikut ini peneliti akan menyajikan pola/skema TOT dalam kegiatan KBKS

4.1.1.8 Pola Pembinaan

Adapun pelaksanaan pola pembinaan ini dilaksanakan pada Bulan April-Bulan Desember. Kalau dihitung-hitung masa pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah ini bahkan tidak sampai satu tahun pada suatu kapung sehingga bisa pelaksanaannya tidak maksimal. Dalam pola binaan keluarga sakinah ini dilakukan pada satu mesjid yang sudah ditetapkan oleh pihak kampung. Semua kegiatan KBKS yang dilaksanakan difokuskan pada satu mesjid tersebut. Perlu dikerahui bahwa dari semua kegaitann yang ada pada pola pembinaan tersebut belum semua terlaksana. Ada beberapa pola pembinaan yang sudah terlaksana dan ada yang belum terlaksana. Pola pembinaan yang sudah terlaksana adalah pola pembinaan kelompok pengajian, pola pembinaan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an dan Pola Pembinaan Tahfiz. Sedangkan pola pembinaan yang belum terlaksana adalah pendataan akte nikah, pola pengembangan ekonomi keluarga, dan

pendataan dan pembinaan muzakki.

4.2.1 Konteks Kebijakan (Context Of Policy)

4.2.1.1 Pembuatan Silabus

Pembuatan silabus termasuk kedala salah satu petunjuk teknis yang ada dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2016. Pembuatan silabus tidak dilaksanakan oleh pelaksana tingkat kabupaten padahal pelaksanaan pembuatan silabus ini sangat penting dilakukan karena targetnya yaitu untuk terwujudnya pemahaman dan pengetahuan serta pengamalan ajara islam yang komprehensif bagi warga binaan terhadap materi dasar silabus di atas dalam rangka terwujudnya keluarga sakinah sebagai elemen utama pembentukan Kampung Binaan Keluarga Sakinah. Sasaran dari pembuatan silabus ini adalah terhadap warga binaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah yang melaksanakan kegiatan tersebut dikampungnya.

4.2.1.2 Pencanaan

Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka perencanaan meruapakan salah satu petunjuk teknis yang dilakukan. Pencanaan juga bisa dikatakan sebagai proses. Pencanaan tidak dilakukan oleh kelompok kerja kabupaten karena alasan dana yang tidak ada. Padahal dalam perencanaan ini yang menjadi peserta hanya terdiri dari semua stakeholder sehingga penting untuk dilasanakan.

4.2.1.3 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dalam pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah untuk mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi pada Kampung Binaan Keluarga Sakinah dengan tujuan agar semua data, masukan

atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Evaluasi didalam pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standart Kampung Binaan Keluarga Sakinah.

5.2 Alasan Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak) belum berjalan secara optimal

5.2.1 Dana Tidak Lancar

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam pelaksanaannya dilakukan oleh sumber daya manusia dan sumber dana yang mencukupi dan tentunya berkualitas. segi keuangan atau dana berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak pada pasal 6 menyebutkan bahwa biaya pembinaan kampung binaan keluarga sakinah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak. Tapi pada prakteknya dana tersebut tidak sampai kepada pihak kampung dengan lancar atau bisa disebut dana tersebut macet sehingga sangat susah bagi pihak kampung untuk menjalankan semua kegiatan yang telah ditetapkan. Karena dana tersebut macet maka pihak kampung menggunakan dana dari

swadaya masyarakat untuk menutupi atau membayar gaji ustadz pembina sebelum dana tersebut sampai kepada pihak kampung. Jadi bagaimana kegiatan ini dapat berjalan secara optimal sedangkan dana yang diterima oleh pihak kampung masih macet atau tidak lancar

5.2.2 Kurangnya Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran

Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Maka pada poin ini dijelaskan sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam penanggapi suatu kebijakan. kegiatan ini bersifat stimulan maksudnya adalah dalam pelaksanaannya bersifat sukarela dari masyarakat di kampung pelaksana. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kegiatan ini dipusatkan pada satu masjid dalam kampung pelaksana. Kemudian dibuat bermacam-macam kegiatan dengan menunjuk ustadz-ustadz pembina. Setelah itu masyarakat atau keluarga sebagai kelompok sasaran diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi peneliti dapat melihat bahwa kurang adanya motivasi dari pemerintah kepada kelompok sasaran untuk mengikuti Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah sehingga membuat kelompok sasaran kurang semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Seharusnya pemerintah harus memberikan motivasi yang lebih agar kepatuhan dan daya tanggap masyarakat itu lebih tinggi pada saat pelaksanaan.

5.2.3 Tidak Berkelanjutan

Sebuah kegiatan besar dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif yang meliputi penggunaan macam-macam sumber daya untuk masa

yang akan datang dalam sebuah pola yang terintegrasi dan menetapkan suatu urutan masing-masing tindakan tersebut dalam rangka usaha mencapai sasaran yang ditetapkan. implementasi Kampung Binaan Keluarga Sakinah ini hanya berjalan satu tahun untuk satu kampung saja. Setelah satu tahun melaksanakan kegiatan tersebut maka dilanjutkan kepada kampung selanjutnya. Sehingga kegiatan KBKS ini bisa dikatakan tidak optimal karena sifatnya bergilir tidak berkelanjutan. Kegiatan ini akan optimal apabila penggunaan sumber daya digunakan untuk masa yang akan datang dalam sebuah pola yang terintegrasi. Padahal tujuan utama dari kegiatan KBKS ini adalah terciptanya Kabupaten Siak menjadi kabupaten sakinah.

5.2.4 Pemerintah Hanya Sebagai Stimulan

Pemerintah sebagai pelaksana mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan sehubungan dengan kegiatan KBKS. Dapat dikatakan demikian karena pemerintah diharapkan mampu menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dalam proses pembangunan tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan atau yang dilaksanakannya. Sedangkan yang terjadi dilapangan adalah pelaksana kegiatan atau pemerintah hanya memberikan stimulan-stimulan berupa anggaran kepada masyarakat sehingga dianggap kurang mendampingi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini. Masyarakat hanya diharapkan untuk berpartisipasi saja dalam kegiatan ini tanpa ada

pendampingan atau motivasi dari para pelaksana kegiatan.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak) belum berhasil secara optimal, karena jika dilihat dari indikator tujuan, pelaksana, sasaran, sosialisasi, TOT, pola pembinaan, dan konteks kebijakannya masih belum sesuai. Namun demikian, jika dilihat dari indikator manfaat dan proses sudah sesuai dengan indikator keberhasilan implementasi Grindle.
2. Adapun yang menyebabkan Implementasi Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah ini belum optimal disebabkan oleh beberapa alasan yaitu Kegiatan ini bersifat bergilir tidak berkelanjutan, Dari segi anggaran atau dana masih kurang optimal, maksudnya adalah dana yang diberikan kepada kampung pelaksana masih macet atau tidak lancar, Kurangnya motivasi dan pendampingan yang diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Siak maksudnya adalah dalam pelaksanaan kegiatan ini pemerintah hanya memberikan stimulan-stimulan saja agar masyarakat mau mengikuti kegiatan ini sehingga kurangnya daya tanggap dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini, Kegiatan ini

hanya bersifat bergilir tidak berkelanjutan dan Kendala pada pola pembinaan kelompok pengajian remaja yaitu susah untuk mengajak remaja kampung untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan ini karena seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kegiatan ini bersifat stimulant bukan paksanaan.

6.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Agar Kabupaten Siak dapat mewujudkan Kabupaten Sakinah maka Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak (Studi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 di Kecamatan Siak) ini harus lebih maksimal lagi dengan hasil dari kegiatan ini harus dapat diukur secara kuantitas maksudnya adalah jelas hasil yang didapatkan harus berdasarkan data bukan hanya sebatas kualitas.
2. Agar Implementasi Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah ini dapat berjalan optimal maka ada beberapak yang harus dilakukan yaitu Kegiatan ini harus bersifat berkelanjutan sehingga tidak diam ditempat dan selesai dengan begitu saja, Dana yang diberikan kepada setiap desa harus dipastikan diterima dengan lancar dan baik agar dalam pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah ini dapat berjalan secara optimal, Seharusnya kegiatan ini tidak

hanya berupa stimulant-stimulan saja dari pemerintah Kabupaten Siak tetapi juga pemerintah dapat mendampingi masyarakat secara langsung pada saat kegiatan berlangsung agar masyarakat dapat tergerak untuk mengikuti kegiatan ini, dan pemerintahan kabupaten siak harus lebih membuat standar penilaian yang jelas dan pengawasan kegiatan yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik*. (D. A. Hakim, Ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Abuzar, A. (2014). *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: In Media.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- de Almeida, J. P. L., Galina, S. V. R., Grande, M. M., & Brum, D. G. (2017). Lean thinking: planning and implementation in the public sector. *International Journal of Lean Six Sigma*, 8(4), 390–410. <https://doi.org/10.1108/IJLSS-06-2016-0027>
- Hordern, J. (2013). Evaluation and implementation: Two regeneration programmes. *International Journal of Public Sector Management*, 26(4), 298–308. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2012-0026>
- Ismail, S., & Harris, F. A. (2014). Challenges in Implementing Public Private Partnership (PPP) in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 5–10. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.044>
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik di Indonesia*. (H. el Rais, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Pasolong, H. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E. A., Pramusinto, A., Kumorotomo, W., Mugesejati, N. P., Widaningrum, A., & Apriliyanti, I. D. (2015). *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan*. (Andayani & L. Rachmani, Eds.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Rudy & E. Ariyanto, Eds.). Yogyakarta: Gava Media.
- Rohman, D. F. H. I. dan H. M. (2016). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang) Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 962–971.
- Stewart, J. (2014). Implementing an innovative public sector program: The balance between flexibility and control. *International Journal of Public Sector Management*, 27(3), 241–250. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2013-0076>
- Subarsono (Ed.). (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sufiadi, J., Noor, I., & Suryadi. (2015). Implementasi Program Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin. *Reformasi*, 5(1), 160–168.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (F. Zulhendri, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (F. Hutari, Ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Jakarta: CAPS.

Dokumen:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pola Pembinaan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Siak.

Website:

- <https://siakkab.bps.go.id/publication/2017/09/20/303164d1fc1511ed2e68e66f/kecamatan-sabak-auh-dalam-angka-2017.html> diakses pada 23 Mei 2018 Pukul 13.00
- <http://siakkab.go.id/sejarah-siak/> diakses pada 24 Mei 2018 Pukul 20.00